

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kawasan Asia Timur telah mengalami *security dilemma*. John H. Herz mendeskripsikan *security dilemma* sebagai kondisi dimana salah satu negara meningkatkan kebutuhan keamanan negaranya masing-masing untuk menghindari serangan dimana hal tersebut memicu ketidaknyamanan untuk negara-negara lain yang berada di dalam kawasan. Selain itu, negara-negara yang berada di dalam kawasan tersebut ikut meningkatkan pertahanan dan keamanannya (Herz, 1950). Dalam hal ini, Korea Utara fokus mengembangkan senjata nuklirnya yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pertahanan negaranya. Sedangkan negara lain yang berada di Kawasan Asia Timur cenderung fokus melakukan kerjasama keamanan dengan negara besar lainnya.

Korea Utara sangat berambisi untuk menjadikan negaranya sebagai negara nuklir agar dapat meningkatkan wibawa dan negoisasi. Pengembangan senjata nuklir di bidang persenjataan tentu bertentangan dengan tujuan damai, berbeda dengan penggunaan nuklir untuk pemenuhan kebutuhan energi. Karena, penggunaan nuklir yang digunakan sebagai senjata tentu dapat mengancam stabilitas keamanan internasional dan tentunya dapat menyebabkan situasi yang rawan akan konflik (Wardhana, 2007).

Pada tahun 1965, Korea Utara mulai mengembangkan senjata nuklirnya yang dibantu Uni Soviet. Pada saat itu, Uni Soviet memberikan pelatihan serta pengetahuan kepada tentara dan para insinyur Korea Utara mengenai nuklir (Project, 2012). Korea Utara mulai mengembangkan nuklirnya pasca Perang Dingin. Perkembangan yang dilakukan Korea Utara terlihat pada tahun 1990-an,

ditandai dengan adanya pengembangan senjata nuklir. Pada tahun 1998, Korea Utara melakukan uji coba misil dengan radius 1.700 KM melewati teritorial Jepang dan jatuh di kepulauan Hawaii (Leofarhan, 2018). Ambisi Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya membuat Korea Utara harus mengundurkan diri dari *Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 2003. Setelah Korea Utara mengundurkan diri dari NPT, Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir yang pertamanya di tahun 2006. Tak hanya cukup sampai Kim Jong-Il saja, namun pengembangan senjata nuklir juga terbawa hingga era Kim Jong-Un.

Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir sebanyak 6 kali, tercatat dari tahun 2006-2017. Uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara mengalami perkembangan setiap kali uji coba. Pada uji coba pertama di tanggal 9 Oktober 2006, gelombang seismik mencapai 4.1 magnitudo dengan hasil yang diperkirakan yakni 0,5 kilotons. Pada uji coba kedua di tanggal 25 Mei 2009, gelombang seismik mencapai 4,5 magnitudo dengan hasil yang diperkirakan yakni 1-3 kilotons. Pada uji coba ketiga di tanggal 12 Februari 2013, gelombang seismik mencapai 5 magnitudo dengan hasil yang diperkirakan yakni 10 kilotons. Pada uji coba keempat di tanggal 6 Januari 2016, gelombang seismik mencapai 5.1 magnitudo dengan hasil yang diperkirakan yakni 5 kilotons. Pada uji coba kelima di tanggal 9 September 2016, gelombang seismik mencapai 4,8 magnitudo dengan hasil yang diperkirakan 10-15 kilotons. Pada uji coba keenam di tanggal 3 September 2017, gelombang seismik yang dihasilkan mencapai 6,1 magnitudo dengan hasil yang diperkirakan 140-250 kilotons (Hans M. Kristensen, 2018).

Uji coba yang dilakukan Korea Utara tentu mendapat sanksi dari Dewan Keamanan PBB. DK PBB mengeluarkan 9 resolusi yang sebagian besar isinya

berupa embargo ekonomi terhadap Korea Utara (Nuraisah, 2021). Sanksi yang diberikan DK PBB terhadap Korea Utara, tidak membuat Korea Utara menghentikan pengembangan program senjata nuklirnya. Oleh karena itu, Korea Selatan merasa terancam akan pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

Di era Park Geun Hye, Korea Selatan menanggapi hal tersebut dengan cara bekerjasama dengan sekutunya yaitu Amerika Serikat. Bentuk kerjasama yang dilakukan Korea Selatan dan Amerika Serikat yaitu pemasangan sistem *Terminal Altitude Area Defence* (THAAD) di Semenanjung Korea (Ethan Meick, 2017). THAAD adalah sistem anti peluru kendali balistik yang dirancang untuk menjatuhkan peluru kendali balistik dengan menggunakan teknologi *hit-to-kill* dan berfungsi untuk mencegah rudal balistik yang berjangka pendek dan menengah hingga 200 KM jauhnya dan 150 KM dari ketinggian (Stafford, 2017). THAAD dinilai sebagai sistem pertahanan rudal yang paling canggih dan efektif karena menurut perkiraan, radar x-band THAAD memiliki jangkauan sekitar 2.000 KM dan dapat mencapai hingga sebagian besar China bagian timur (Defence, 2016).

Korea Selatan berencana memasang sistem THAAD di tahun 2014, namun pembicaraan secara resmi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat baru terjalin setelah Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir yang keempat. Setelah berdialog mengenai kecocokan sistem THAAD di Korea Selatan akhirnya pada tanggal 7 Juli 2016, Park Geun Hye mengumumkan kepada publik bahwa Korea Selatan sepakat memasang sistem THAAD. Pemasangan sistem THAAD di Korea Selatan bertujuan untuk melindungi rakyat Korea Selatan dan melindungi tentara Amerika Serikat dari senjata nuklir Korea Utara (Policy, 2017).

Pada tanggal 22 Juli 2016, Korea Selatan mengumumkan bahwa pemasangan sistem THAAD akan bertempat di Seongju yang kurang lebih berjarak 200 KM dari Seoul. Alasan Seongju menjadi target penempatan sistem THAAD karena lokasinya cukup strategis untuk melindungi kota-kota besar yang ada di Korea Selatan seperti Busan, Ulsan dan Pohang. Selain itu, Seongju merupakan tempat para tentara Amerika Serikat tinggal, sehingga jika ada serangan dari Korea Utara, bala bantuan yang diberikan Amerika Serikat akan cepat. Kelemahan daripada penempatan sistem THAAD di Seongju yaitu sistem THAAD tidak dapat melindungi Seoul yang merupakan Ibu Kota Korea Selatan (Policy, 2017).

Saat akan dipasangnya sistem THAAD di Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan sebelumnya melakukan survey terhadap warga negaranya melalui Gallup Korea atau lembaga survey Korea Selatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lembaga survey Korea Selatan, Warga Korea Selatan memberikan hasil yakni 50% warga setuju dengan pemasangan sistem THAAD, 32% warga menolak pemasangan sistem THAAD dan sebanyak 18% warga tidak peduli dengan pemasangan sistem THAAD. Dari hasil tersebut, warga negara Korea Selatan dinilai cukup kritis dalam menanggapi suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah negaranya. Terdapat sebanyak 50% warga negara yang telah di wawancarai mengenai dukungannya terhadap pemasangan sistem THAAD. Warga negara yang menyetujui kebijakan ini beralasan bahwa keamanan serta keselamatan warga negara menjadi prioritas pemerintah negaranya, oleh karena itu mereka menyetujui kebijakan ini. Sedangkan 32% warga yang menolak, mereka beralasan bahwa dengan di pasang nya sistem THAAD di Korea Selatan maka akan merusak hubungan baik antara Korea Selatan dengan China. Alasan lain yang dikemukakan

oleh warga yang menolak adalah mereka tidak mau bergantung dengan Amerika Serikat (Novianto, 2018).

Penempatan sistem THAAD juga mendapat penolakan dari warga sekitar juga melakukan penolakan karena warga disekitar merasa kebisingan dari aktivitas pemasangan sistem THAAD. Warga yang bertempat tinggal di Seongju dan Gyeonsang menjadi salah satu penentang keras pemasangan sistem THAAD. Selain itu, warga mengira bahwa dengan dilakukannya pemasangan sistem THAAD tentu akan mengganggu kesehatan dari efek radiasi. Alasan selanjutnya, warga merasa lahan yang seharusnya diperuntukan untuk warga menjadi hilang dan jika terdapat sistem THAAD di sekitarnya maka akan warga khawatir jika daerah pemukiman warga akan menjadi target serangan militer (Intitute for Security and Development Policy , 2017). Selain warga Seongju dan Gyeonsang, pemasangan sistem THAAD ini juga mendapat kritik dari kubu konservatif yang menilai bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Park Geun Hye tidak demokratis. Gubernur setempat juga sempat mengatakan bahwa ia mengetahui putusan kebijakan yang dijalankan oleh Park Geun Hye melalui media massa (Intitute for Security and Development Policy , 2017). Pada mulanya, lokasi pemasangan sistem THAAD berada di pangkalan Angkatan Udara Korea Selatan. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa penempatan sistem THAAD dipindahkan ke tempat bekas lapangan golf.

Selain dapat penolakan keras dari warga sekitar, penempatan sistem THAAD juga mendapat penolakan keras dari China. China menolak dengan alasan jangkauan yang dicapai dari sistem THAAD itu sendiri. Menurut China, cakupan pemantauan radar X-Band-nya jauh melebihi kebutuhan pertahanan di Semenanjung Korea dan jauh mencakup ke pedalaman Asia, hal tersebut dinilai

akan merusak kepentingan keamanan China (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016). Dalam menanggapi keputusan yang diambil Korea Selatan, China langsung mengeluarkan perubahan kebijakan ekonomi terhadap Korea Selatan. Selang beberapa jam setelah di umulkannya pemasangan THAAD di Korea Selatan, China menurunkan duta besar Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk memprotes serta menyampaikan ketidaksetujuannya (China Ministry of Foreign Affairs, 2016).

Isu yang awalnya merupakan isu pertahanan berubah menjadi isu ekonomi. Karena ketidaksetujuan China terhadap Pemasangan sistem THAAD di Korea Selatan, China memblokir seluruh akses pasar barang dan jasa ke Korea Selatan dari berbagai sektor (Ethan Meick, 2017). Blokir yang dilakukan China terhadap Korea Selatan yaitu memboikot keseluruhan aspek perdagangan antara Korea Selatan dengan China dan penerapan sanksi secara menyeluruh terhadap bidang industri kebudayaan Korea Selatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Korea Selatan merupakan negara yang dinilai cukup aktif dalam memproduksi, mengembangkan, mengenalkan dan bahkan menyebarkan produk kebudayaannya melalui ekspor budaya ke negara lain, selain itu ekspor budaya juga dijadikan sebagai dasar motivasi ekonomi Korea Selatan. Dalam kebudayaan Korea Selatan, industri budaya dikemas dan disajikan dalam bermacam-macam bentuk hingga dapat dinikmati oleh berbagai negara yang bukan hanya dipasarkan di Korea Selatan saja melainkan menjadi pasar global (Asinault Tamba, 2021).

Terdapat lima boikot yang tentunya sangat mempengaruhi perekonomian Korea Selatan. Pertama, drama yang dikenal dengan K-Drama, K-Drama ini mengangkat kisah dari berbagai genre dan memperlihatkan budaya Korea Selatan

dalam penyajian film. Kedua, musik populer milik Korea Selatan yang bergenre musik pop dan dinyanyikan oleh suatu kelompok. Musik populer yang biasa di bawakan oleh sekelompok *girl/boy* band Korea Selatan ini kerap disebut dengan K-Pop. Dalam produksi serta memasarkan K-Drama ataupun K-Pop terdapat tiga perusahaan besar di Korea Selatan, yakni SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment (Chusna, 2022). Pada masa boikot yang dilakukan China terhadap Korea Selatan, saham SM Entertainment turun sebesar 8,2% atau setara dengan \$21.9. Selain itu, SM Entertainment juga mengalami penurunan saham sebesar 6,9% atau setara dengan \$23.32 dan terakhir JYP Entertainment yang juga ikut mengalami penurunan sebesar 2,8% atau setara dengan \$4.46 (Asinauli Tamba, 2021).

Ketiga, China turut memboikot produk makeup Korea Selatan yang kita kenal dengan K-Beauty. Dari adanya produk kosmetik yang di promosikan Korea Selatan, tentunya Korea Selatan mendapat keuntungan dari produk kecantikan tersebut. Oleh karena itu, Korea Selatan mendapatkan devisa negaranya selain melalui industri hiburan yaitu produk-produk lainnya yang di promosikan melalui industri kebudayaan. Maka dari itu, ketenaran produk kosmetik merupakan salah satu pendapatan Korea Selatan (Ja-Young, 2017). China merupakan negara tujuan Korea Selatan dalam melakukan ekspor industri budaya hiburan karena tercatat bahwa terdapat permintaan yang tinggi dari warga negara China akan produk-produk yang di promosikan oleh *Hallyu*. Keberhasilan *Hallyu* di China dapat dilihat dari kenaikan ekspor di tahun 2016 sebesar \$43.189 Juta, yang dimana pada sebelumnya tahun 2015 hanya mencapai \$40.312,73 Juta. Selain daripada produk

kosmetik, bidang musik juga mengalami peningkatan yang sama dan pendapatan yang didapat sebesar \$409 Juta (Asinauli Tamba, 2021).

Keempat, bidang pariwisata Korea Selatan yang juga terkena dampak dari boikot yang dilakukan China. Hal ini terjadi karena China menerapkan sanksi berupa menghentikan beberapa maskapai untuk terbang dengan rute Korea Selatan. Hal tersebut dinilai yang merugikan karena banyaknya wisatawan yang ingin mengunjungi Korea Selatan untuk menikmati industri budaya Korea Selatan seperti menonton konser ataupun berbelanja produk yang dimiliki Korea Selatan (Ethan Meick, 2017). Selain itu, China juga melarang penjualan paket liburan ke Korea Selatan. Larangan tersebut diperuntukkan kepada seluruh agen wisata yang berada di China dan diumumkan langsung oleh Administrasi Pariwisata Nasional China (Organization, 2017). Boikot tersebut berdampak pada menurun drastisnya wisatawan yang berasal dari China, penurunan tersebut sebanyak 66% dari keseluruhan wisatawan yang mengunjungi Korea Selatan. Pada tahun 2016, wisatawan China yang mengunjungi Korea Selatan sebanyak 758.534 orang menjadi 254.930 orang saja pada 2017 (Organization, 2017). Pendapatan yang didapat dari bagian pariwisata juga ikut menurun, terlebih pada *departement store* ataupun pedagang-pedagang lokal di Korea Selatan. Karena pendapatan yang diperkirakan dari wisatawan China dalam berbelanja menghabiskan sekitar \$762 per orang (NielsenIQ, 2017).

Kelima, boikot yang dilakukan juga berdampak terhadap perusahaan terbesar China yang banyak tersebar di negara-negara lain yaitu perusahaan *Lotte Group Cooperation*. Kenaikan perusahaan ini karena dibawakan oleh bintang-bintang *Hallyu* yang dipromosikan melalui media massa dan dipasarkan melalui film, dll.

Oleh karena itu, tingkat penjualan dari perusahaan Lotte menjadi tinggi dan perusahaannya dapat tersebar dimana-mana. Namun, hal tersebut memancing emosi para penduduk China karena pada masa boikot diduga telah membantu Korea Selatan dalam penempatan sistem THAAD. Sehingga menyebabkan banyaknya toko-toko Lotte yang berada China mengalami penutupan toko (Lee J.-M. P., 2017). Terdapat sebanyak 115 *Lotte Mart* tutup yang dimana sebanyak 74 toko ditutup paksa oleh pemerintah China dan 13 toko lainnya tutup karena adanya gerakan nasionalisme dari masyarakat China yang menolak Korea Selatan dan gerakan masyarakat yang merasa dirugikan oleh penempatan sistem THAAD di Korea Selatan. Penutupan toko-toko Lotte di China membawa dampak yang besar untuk Korea Selatan karena Korea Selatan mengalami kerugian mencapai triliunan Won. Oleh karena itu, perekonomian Korea Selatan mengalami penurunan dan berada diambang krisis (Min-hee, 2017).

Banyaknya kontroversi seperti kasus korupsi dan kebijakan luar negeri yang tidak dijalankan sesuai prosedur di era Park Geun Hye (BBC News , 2018) tentunya mendapat banyak protes dari masyarakat Korea Selatan yang dijuluki *Candlelight Revolution*. Salah satu kebijakan luar negeri yang tidak sesuai prosedur adalah pemasangan sistem THAAD di Korea selatan. Oleh karena itu, Park Geun Hye dicopot dari jabatannya sebagai presiden (Sang-Hun, 2017).

Setelah Park Geun Hye mundur dari jabatannya sebagai presiden, Korea Selatan memiliki Undang-Undang yakni dimana negara wajib memilih presiden baru dalam kurun waktu 60 hari. Pemilihan presiden yang baru dimenangkan oleh Moon Jae In dari partai politisi liberal. Kemenangan Moon Jae In diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya telah dibuat oleh mantan pemimpin

dari pemerintahan konservatif seperti kebijakan luar negeri dan korupsi. Kemenangan Moon meraih suara sebanyak 41,4% dan kemenangan ini merupakan kemenangan yang tertinggi dalam 20 tahun. Kemenangan Moon juga merupakan bentuk simpati liberal setelah Park Geun Hye dicopot dari jabatannya. Selain itu, Moon dikenal sebagai presiden yang bersih untuk memberantas korupsi dan mengatasi ekonomi yang pada saat itu sedang mengalami krisis akibat boikot dari China. Selain itu, Moon juga dalam pemilihannya berencana untuk memerangi korupsi terhadap chaebol yang diduga perusahaan tersebut dikendalikan oleh keluarga yang melakukan kesepakatan curang dengan pemerintah. Selain itu, kemenangan Moon terjadi pada saat keadaan Korea Selatan dengan Korea utara sedang meningkat ketegangannya. Karena Korea Utara yang terus memperlihatkan peluncuran rudal dan pemerintahan Donald Trump yang merespon dengan semua opsi strategis termasuk militer (Jaewo, 2018).

Tantangan selanjutnya yang dialami Moon adalah dimana kaum liberal dilarang bekerjasama keamanan (aliansi) dengan Amerika Serikat karena semboyan politik mereka adalah sejajar dengan Amerika Serikat dan menjunjung tinggi kemandirian dan otonomi dalam menghadapi persekutuan dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, para pemimpin liberal lebih bersimpati terhadap tujuan Korea Utara di bidang keamanan dan politik dan mereka lebih memilih untuk berdialog daripada berkonfrontasi dengan Korea Utara (Jaewo, 2018).

Terpilihnya Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan, ia bertekad untuk memperbaiki hubungannya dengan China. Korea Selatan melakukan upaya diplomasi dengan China untuk meyakinkan bahwa THAAD hanya bertujuan untuk sistem keamanan negaranya saja bukan berniat untuk mengganggu keamanan

domestik China. Dalam melakukan upaya memperbaiki hubungannya dengan China, Korea Selatan melakukan beberapa pertemuan dengan China. Pada mulanya, Moon Jae In menyatakan keprihatinannya kepada China mengenai sistem THAAD yang ditempatkan di Korea Selatan. Pernyataan keprihatinannya itu Moon Jae In mengadakan pertemuan bilateral dengan China untuk menyatakan pemahamannya mengenai sistem THAAD yang berada di Korea Selatan. hal tersebut dilakukan Moon Jae In agar hubungan antar kedua negara dapat membaik, terlebih hubungan ekonomi antar kedua negara.

Pada Juni 2017, perdana menteri Korea Selatan Lee Chan Hee melakukan perjalanan ke China untuk menghadiri *Conference on Interaction and Confidence-Building Measure in Asia* (CICA). Dalam forum CICA, perdana menteri Korea Selatan menyatakan tawarannya untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan China. Selanjutnya dalam forum G-20 yang diselenggarakan di Jerman, Moon Jae In dan Xi-Jinping berdialog mengenai pentingnya hubungan bilateral antara Korea Selatan dan China, namun dalam pertemuan kali ini, kedua negara belum menemukan kesepakatan untuk menghapus hambatan utama yang dijadikan permasalahan yaitu sistem THAAD (Made Cynthia Paramitha, 2021).

Korea Selatan diberatkan dengan dua pilihan pada saat ini karena China menuntut Korea Selatan untuk melindungi kepentingan China. Namun disisi lain, Korea Selatan masih membutuhkan sistem pertahanan THAAD karena mengingat terdapat berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara mengenai peluncuran rudal. Jika Korea Selatan tidak segera mengambil tindakan dengan memperbaiki hubungannya dengan China, maka hal tersebut akan mengancam perekonomian Korea Selatan. Akhirnya keputusan yang dilakukan Korea Selatan

yaitu tetap memasang dua baterai dari empat baterai THAAD. Keputusan tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan negaranya dengan Amerika Serikat. Selain itu, alasan Korea Selatan menunda pemasangan dua baterai lainnya karena menunggu hasil penilaian lingkungan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan mengenai penempatan THAAD di Korea Selatan. Pasca Korea Utara melakukan peluncuran rudal Hwasung-14 ICBM pada 3 September 2017, Korea Selatan terpaksa memasang dua baterai lainnya.

Setelah Korea Selatan melakukan beberapa kali pertemuan dan negoisasi dengan China, akhirnya pertemuan antar pemerintah Korea Selatan dan pemerintah China dalam rapat Pemeriksa Keuangan pada 30 Oktober 2017 menemukan titik terang dari permasalahan antara kedua negara. Titik terang ditemukan setelah menteri luar negeri Korea Selatan yaitu Kang Kyung Wha menyatakan persetujuannya terhadap keputusan China mengenai *Three No's*. Poin yang terdapat di dalam kesepakatan itu yakni 1) China tidak menginginkan adanya pemasangan THAAD tambahan di Korea Selatan, 2) Korea Selatan tidak diperbolehkan berpartisipasi kedalam jaringan pertahanan misil milik Amerika Serikat, 3) Korea Selatan tidak boleh membentuk kerjasama militer trilateral dengan Jepang dan Amerika Serikat (Ho, 2018).

Setelah Korea Selatan menyepakati *Three No's* kedua menteri luar negeri Korea Selatan dan China menyatakan bahwa secara resmi bahwa hubungan kedua negara tersebut telah sepakat untuk dinormalisasikan kembali, hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang terjadi antara Korea Selatan dan China. Setelah menyepakati *Three No's*, Korea Selatan kembali mendapat

kepercayaan dari China dan dapat mempertahankan China sebagai mitra dagang terbesar Korea Selatan (Permatasari, 2019).

Sebelum dilakukan penelitian, perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan di era Park Geun Hye dan Moon Jae In jelas sangat berbeda. Kebijakan luar negeri yang dijalankan Park lebih condong kepada Amerika Serikat dan mengabaikan hubungan baiknya dengan China. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dihiraukannya seruan China yang menentang pemasangan sistem THAAD, namun Korea Selatan tetap memasang sistem THAAD. Oleh karena itu China mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Korea Selatan dengan memberikan sanksi ekonomi, sanksi tersebut berupa boikot terhadap industri budaya serta produk-produk Korea Selatan. Sedangkan di era Moon, kebijakan luar negeri yang dijalankan lebih condong kepada Korea Utara dan China. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya diplomasi yang dilakukan Moon dengan China yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi Korea Selatan yang dimana sebelumnya hubungan kedua negara tidak baik-baik saja di era Park karena penempatan sistem THAAD di Korea Selatan. Selain itu, Moon menjalankan kebijakan *Sunshine Policy* dan menyepakati *Three No's* dalam memperbaiki hubungannya dengan China.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Orientasi Negara-negara di Kawasan Asia Timur Pasca Penempatan Sistem THAAD di Korea Selatan Tahun 2018-2022”**

1.2 Perumusan masalah

Agar peneliti dapat lebih mudah dalam menganalisa permasalahan yang berfokus pada latar belakang serta identifikasi masalah yang sudah dideskripsikan

sebelumnya bahwa penempatan sistem THAAD di Korea Selatan menyebabkan adanya perubahan sikap negara-negara di Kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, peneliti merumuskan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana perubahan kebijakan luar negeri negara-negara di Kawasan Asia Timur pasca penempatan sistem THAAD di Korea Selatan pada tahun 2018-2022?”

1.3 Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah peneliti paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri negara-negara di Kawasan Asia Timur yakni Korea Utara, China dan Jepang pada tahun 2018-2022 yang merupakan suatu hal yang penting dalam mendekati pada pokok pembahasan yang akan dibahas. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat sikap negara-negara di Kawasan Asia Timur pasca penempatan sistem THAAD di Korea Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan adanya perubahan kebijakan luar negeri negara-negara di Kawasan Asia Timur pasca penempatan sistem THAAD di Korea Selatan.

3. Untuk menjelaskan bagaimana perubahan terhadap kebijakan luar negeri negara-negara di Kawasan Asia Timur pasca penempatan sistem THAAD di Korea Selatan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan bagi para pembaca.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pembacanya, terutama Mahasiswa/i Ilmu Hubungan Internasional.
3. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.